

**LAPORAN TAHUNAN**  
**PENELITIAN HIBAH BERSAING**



**RANCANGAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN BAGI UKM  
PERBANKAN (BPR) DI GERBANG KERTO SUSILA**  
Tahun ke Satu Dari Rencana Dua Tahun

**TIM PENGUSUL**

<b>Rohmawati Kusumaningtias, S.E., MSA., Ak</b>	<b>0023068203</b>
<b>Dra. Hariyati, M.Si., Ak</b>	<b>0001106510</b>
<b>Ni Nyoman Alit Triani, S.E., M.Ak</b>	<b>0020058010</b>

**UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA**

**Desember 2013**

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**PENELITIAN HIBAH BERSAING**

**Judul Kegiatan** : RANCANGAN SISTEM PELAPORAN KEUANGAN BAGI UKM PERBANKAN (BPR) YANG BERSTANDAR IFRS for SME DI WILAYAH GERBANGKERTOSUSILA, JAWA TIMUR

**Kode>Nama Rumpun Ilmu** : 562 / Akuntansi

**Ketua Peneliti**

A. Nama Lengkap : ROHMAWATI KUSUMANINGTIAS S.E., Ak., MSA.  
B. NIDN : 0023068203  
C. Jabatan Fungsional : Lektor  
D. Program Studi : Pendidikan Ekonomi  
E. Nomor HP : 08113491283  
F. Surel (e-mail) : rkn.tias@gmail.com

**Anggota Peneliti (1)**

A. Nama Lengkap : Dra. HARIYATI, Ak., M.Si.  
B. NIDN : 0001106510  
C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

**Anggota Peneliti (2)**

A. Nama Lengkap : NI NYOMAN ALIT TRIANI SE., M.Ak.  
B. NIDN : 0020058010  
C. Perguruan Tinggi : UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA

**Lama Penelitian Keseluruhan** : 2 Tahun

**Penelitian Tahun ke** : I

**Biaya Penelitian Keseluruhan** : Rp 150.000.000,00

**Biaya Tahun Berjalan** : - diusulkan ke DIKTI Rp 75.000.000,00  
- dana internal PT Rp 0,00  
- dana institusi lain Rp 0,00  
- inkind sebutkan

  
Mengesahkan  
Dekan Fakultas Ekonomi  
(Prof. Dr. Bambang Suratman, M.Pd)  
NIP/NIK 195012121978021001

Surabaya, 10 - 12 - 2013.  
Ketua Peneliti  
(ROHMAWATI KUSUMANINGTIAS S.E., Ak., MSA.)  
NIP/NIK 198206232006042001

  
Menyetujui  
Kepala BPPM UNESA  
(Dr. I. Wayan Susila, M.T.)  
NIP/NIK 195312151980021002

## RINGKASAN

Perbankan memiliki peranan yang penting sebagai perantara (intermediaries) pada sektor keuangan, khususnya untuk sektor perbankan mikro (microbanking.) BPR (Bank Perkreditan Rakyat) Syariah memiliki posisi yang strategis. BPR Syariah memiliki misi membantu masyarakat tingkat menengah dengan memberikan akses terhadap pelayanan keuangan, sehingga BPR Syariah harus memiliki kinerja keuangan yang baik. Kinerja keuangan yang baik diperoleh dengan dukungan efisiensi dan efektivitas operasional perbankan. Perancangan sistem yang baik atas pelaporan keuangan yang berstandar syariah merupakan salah satu cara untuk mendukung kinerja keuangan BPR Syariah. Penelitian ini bertujuan jangka pendek untuk mengubah posisi UKM seperti BPR Syariah menjadi feasible, auditable dan bankable melalui penerapan teknologi informasi dalam bidang akuntansi. Secara jangka panjang diharapkan penelitian ini dapat membangun ekonomi kerakyatan berbasis UMKM di wilayah GERBANGKERTOSUSILA, Jawa Timur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa laporan keuangan BPR Syariah sesuai dengan standar dari Bank Indonesia namun kurang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Syariah. Penelitian ini menghasilkan draft laporan keuangan yang diharapkan dapat menjembatani ketidaksesuaian pelaporan keuangan antara standar Bank Indonesia dengan SAK Syariah.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan hidayahNya maka penelitian ini dapat terselesaikan dengan baik. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk menghasilkan desain laporan keuangan yang diharapkan dapat menjembatani ketidaksesuaian pelaporan keuangan antara standar Bank Indonesia dengan SAK Syariah. Penyelesaian penelitian melibatkan banyak pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu, sehingga peneliti menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya pada berbagai pihak yang telah membantu terselesaikannya penelitian ini. Penelitian ini tentunya jauh dari sempurna sehingga kritik dan saran dari berbagai pihak sangat kami harapkan.

Surabaya, 9 Desember 2013

Ketua Peneliti

## DAFTAR ISI

Halaman Sampul	
Halaman Pengesahan	
Ringkasan	
Kata Pengantar	
Daftar Isi	
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	<b>1</b>
1.1. Latar Belakang Permasalahan	1
1.2. Tujuan Khusus	3
1.3. Urgensi Penelitian	4
1.4. Temuan/Inovasi Penunjang Pembangunan dan Pengembangan Iptek-Sosbud	4
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	<b>5</b>
2.1. Sistem Akuntansi	5
2.2. Pengendalian Internal	5
2.3. Sistem Akuntansi Terkomputerisasi	6
2.4. Laporan Keuangan	7
2.5. Pengembangan Sistem Informasi	8
2.6. Penelitian Terdahulu	12
2.7. Peta Jalan Penelitian	14
<b>BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN</b>	<b>16</b>
3.1. Tujuan Penelitian	16
3.2. Manfaat Penelitian	16
<b>BAB IV METODE PENELITIAN</b>	<b>17</b>
4.1. Pendekatan Penelitian	17
4.2. Sumber dan Jenis data	18
4.3. Teknik dan Analisis data	18
4.4. Tahapan Penelitian	19
<b>BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>21</b>
5.1. Hasil Penelitian	21
5.2. Pembahasan Hasil Penelitian	23
<b>BAB VI RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA</b>	<b>33</b>
<b>BAB VII SIMPULAN DAN SARAN</b>	<b>34</b>
7.1. Simpulan	34
7.2. Saran	34
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>35</b>
Lampiran	

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Permasalahan**

Perbankan memiliki peranan yang vital sebagai perantara (*intermediaries*) sektor keuangan, khususnya untuk sektor perbankan mikro (*microbanking*) BPR (Bank Perkreditan Rakyat) memiliki posisi yang strategis. Sejak awal keberadaannya BPR telah memiliki misi membantu masyarakat miskin, terutama di wilayah pedesaan, yakni memberikan akses terhadap pelayanan keuangan. Namun agar tetap dapat berkelanjutan, BPR juga harus mampu menghasilkan keuntungan yang memadai. Untuk itu BPR juga harus memiliki kinerja keuangan yang baik.

BPR merupakan lembaga perbankan resmi yang diatur berdasarkan Undang-Undang No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan dan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 10 tahun 1998. Dalam undang-undang tersebut secara jelas disebutkan bawah ada dua jenis bank, yaitu Bank Umum dan BPR. Fungsi BPR tidak hanya sekedar menyalurkan kredit kepada para pengusaha mikro, kecil dan menengah, tetapi juga menerima simpanan dari masyarakat. Dalam penyaluran kredit kepada masyarakat menggunakan prinsip 3T, yaitu Tepat Waktu, Tepat Jumlah, dan Tepat Sasaran. Dalam menjalankan operasional usahanya, BPR sebagai lembaga keuangan harus memenuhi standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia.

Standar akuntansi keuangan sebagai acuan penyusunan laporan keuangan yang handal, transparan, dan tidak menyesatkan, berperan penting dalam pembangunan ekonomi untuk membina dan mengembangkan pasar uang dan pasar modal. Bersamaan dengan perkembangan dan dinamika bisnis dalam skala nasional dan internasional, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menetapkan standar khusus untuk lembaga keuangan syariah, yaitu PSAK Syariah 101 sampai 111.

PSAK Syariah ini telah berlaku efektif per 1 Januari 2012 sehingga perusahaan kecil seperti Usaha Kecil Menengah (UKM) termasuk Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Syariah harus membuat laporan keuangan dengan menggunakan standar syariah. Sesuai dengan ruang lingkup PSAK Syariah, standar ini digunakan oleh entitas yang berada dalam bisnis syariah. Terkait dengan hal tersebut, seharusnya semua pihak mendukung pertumbuhan UKM di Indonesia termasuk BPR Syariah.

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia Nomor 11/37/DKBU tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka BPR harus menggunakan Standar Akuntansi Keuangan dalam penyusunan Laporan Keuangannya. Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan BPR dan penyusunan laporan keuangan yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, BPR wajib menyusun dan menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan yang relevan bagi BPR. Standar akuntansi keuangan bagi BPR Syariah adalah PSAK Syariah.

PSAK Syariah tentu akan berdampak pada entitas yang harus menerapkan. Dampak sosial dan ekonomi harus dihadapi, yang berlanjut pada dampak teknologi. Dampak terhadap beban kerja, tahapan implementasi dan beban biaya pasti harus dihadapi BPR Syariah sebagai entitas yang harus menerapkan PSAK Syariah.

Dampak tersebut berimbas pada kinerja keuangan BPR Syariah setelah menerapkan PSAK Syariah tersebut. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan oleh Hariyati (2012) secara analisis kualitatif dapat diketahui penerapan SAK akan berdampak pada aspek sosial, teknologi dan ekonomi masyarakat. Hal ini juga sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Husada (2009) yang mengatakan bahwa dengan diterapkannya standar IFRS SME pada BPR konvensional diharapkan akan ada beberapa terobosan baru, antara lain pembangunan perangkat lunak berbasis ETAP, pendirian KAP khusus untuk UKM, dan membangun perekonomian berbasis UKM, meningkatkan kinerja UKM, memberikan kebebasan berbisnis, peluang berinvestasi, membuka lapangan kerja, mendukung reformasi IFRS for SME keuangan global, membangun ekonomi kerakyatan berbasis UMKM, dan memberikan dasar pedoman audit UKM serta meningkatkan kemampuan UKM mendapat fasilitas kredit dan mendorong pertumbuhan investasi.

Menurut pasal 1 ayat 4 Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998, BPR adalah lembaga keuangan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Penelitian ini memilih BPR Syariah karena merupakan salah satu lembaga keuangan perbankan syariah yang operasionalnya mengikuti prinsip-prinsip syariah. Pada dasarnya, pendirian BPR Syariah mempunyai dua tujuan yang utama. Yang pertama yaitu menghindari riba dan yang kedua yaitu mengamalkan prinsip-prinsip syariah dalam perbankan khususnya melalui BPR untuk tujuan kemaslahatan.

Beberapa penelitian mengenai standarisasi laporan keuangan untuk UKM dan pentingnya informasi teknologi telah dilakukan. Hariyati (2012) menyatakan bahwa penerapan SAK akan berdampak pada aspek sosial, teknologi dan ekonomi masyarakat. Sedangkan Husada

(2010) menyimpulkan pentingnya UKM untuk menyusun Laporan Keuangan yang berstandar SAK- ETAP sehingga UKM yang didalamnya termasuk BPR Syariah menjadi suatu entitas yang *feasible, auditable* dan *bankable*. Yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja keuangan BPR menjadi lebih baik. Pada kedua penelitian tersebut masih bersifat deskriptif. Sedangkan dalam penelitian ini bertujuan untuk menerapkan standarisasi laporan keuangan BPR Syariah dengan penerapan sistem informasi akuntansi.

### **Rumusan Masalah**

Dari latar belakang di atas maka rumusan masalah yang akan diusulkan sebagai berikut:

Bagaimana Perancangan Sistem Pelaporan Keuangan Bagi UKM Perbankan (BPR) Syariah Di GERBANG KERTOSUSILA.

### **1.2 Tujuan Khusus**

Implementasi penerapan PSAK Syariah harus dapat dimonitor dengan jelas mengingat keberadaan PSAK Syariah bertujuan untuk mengubah posisi UKM seperti BPR Syariah menjadi *feasible, auditable* dan *bankable*. Untuk tujuan tersebut maka karakteristik bisnis keuangan BPR Syariah harus dapat bersifat *understandability, relevance, reliability, dan comparability*. *Understandability* merupakan syarat kualitas penting informasi yang harus disediakan oleh suatu sistem pelaporan keuangan. Dengan kemudahan pemahaman informasi maka laporan keuangan akan *relevance* sehingga dapat mendukung pengambilan keputusan di masa mendatang berdasarkan informasi masa lalu yang dibutuhkan. Selain itu juga harus *reliability* (dapat diandalkan), tidak menyesatkan, tidak bias, akurat, dan komplit. Dan yang terakhir adalah *comparability* (dapat dibandingkan). Dengan penerapan PSAK Syariah diharapkan *output* laporan keuangan dapat dibandingkan secara khusus untuk satu BPR Syariah di beberapa tahun yang berbeda, dan secara umum untuk beberapa BPR Syariah.

Perancangan sistem pelaporan keuangan yang berstandar IFRS *for SME* ini secara jangka pendek bertujuan untuk mendukung harmonisasi laporan keuangan BPR di wilayah Jawa Timur dan secara jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional BPR Syariah yang pada akhirnya secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tugas dan fungsi pokok BPR Syariah adalah menyimpan dan menyalurkan kredit bagi usaha mikro.

### **1.3 Urgensi (Keutamaan) Penelitian**

Keutamaan penelitian ini pada terbentuknya pelaporan keuangan BPR Syariah yang *feasible, auditable, dan bankable*. *Feasible* artinya laporan keuangan tersebut layak untuk diterbitkan dan dapat diperiksa oleh auditor (*auditable*) sehingga pada akhirnya memenuhi kriteria standarisasi peraturan perbankan (*bankable*). Sistem pelaporan keuangan BPR Syariah yang *feasible, auditable dan bankable* akan meningkatkan efisiensi operasional yang mempermudah proses bisnis harian. Efisiensi dan efektivitas BPR Syariah yang bisnis intinya adalah melayani usaha kecil dan menengah diharapkan akan meningkatkan peluang berinvestasi, kebebasan berbisnis, membuka lapangan kerja, meningkatkan kinerja UKM yang pada akhirnya akan membangun ekonomi kerakyatan berbasis UMKM.

### **1.4 Temuan/Inovasi Penunjang Pembangunan dan Pengembangan Ipteks-Sosbud**

Rancangan sistem pelaporan keuangan BPR Syariah berstandar PSAK Syariah ini memanfaatkan pengembangan teknologi informasi dalam akuntansi keuangan. Hasilnya berupa sistem informasi akuntansi BPR Syariah penunjang efisiensi dan efektivitas operasional BPR Syariah. Hal ini akan mempermudah pelayanan BPR Syariah sebagai lembaga keuangan berbasis kredit kecil dan menengah. Dengan demikian diharapkan akan meningkatkan kinerja UKM dan membangun ekonomi kerakyatan di wilayah GERBANGKERTOSUSILA, Jawa Timur.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Sistem Akuntansi.**

Sistem akuntansi (*accounting system*) adalah metode dan prosedur untuk mengumpulkan, mengklasifikasikan, mengikhtisarkan, dan melaporkan informasi operasi dan keuangan sebuah perusahaan. Sistem akuntansi berkembang melalui tiga langkah ketika perusahaan mengalami perubahan yaitu:

- 1) Langkah pertama, yaitu analisis (*analysis*) yang terdiri dari:
  - a. Identifikasi kebutuhan dari pihak-pihak yang membutuhkan laporan keuangan
  - b. Penentuan bagaimana sistem akan menyajikan informasi tersebut.
- 2) Langkah kedua, sistem akuntansi dirancang (*designed*) agar mampu memenuhi kebutuhan para pengguna.
- 3) Langkah terakhir, sistem akuntansi diterapkan (*implemented*) dan digunakan untuk mengolah data akuntansi dan menyajikan laporan keuangan.

#### **2.2 Pengendalian Internal**

Menurut Warren, et. al (1999:184), tujuan pengendalian intern adalah (1) Dapat melindungi aktiva dengan mencegah pencurian, penggelapan, penyalahgunaan atau penempatan aktiva pada lokasi yang tidak tepat dan digunakan untuk mencapai tujuan usaha. (2) Informasi bisnis yang akurat diperlukan demi keberhasilan usaha. (3) Perusahaan harus mematuhi perundang-undangan dan peraturan yang berlaku. Jadi, dapat disimpulkan bahwa pengendalian internal dan metode pengolahan data merupakan hal yang mendasar dalam sistem akuntansi. Pengendalian internal (*internal control*) merupakan kebijakan dan prosedur untuk melindungi aktiva perusahaan dari kesalahan penggunaan, memastikan bahwa informasi usaha/bisnis yang disajikan akurat dan meyakinkan bahwa standar serta peraturan yang berlaku telah diikuti.

Manajemen bertanggung jawab untuk merancang dan menerapkan unsur pengendalian intern untuk mencapai tujuan pengendalian intern. Menurut Mulyadi, (2001:164), unsur-unsur pokok dalam sistem pengendalian intern adalah sebagai berikut :

- 1) Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas.

Struktur organisasi merupakan kerangka pembagian tanggung jawab fungsional kepada unit-unit organisasi yang dibentuk untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan pokok perusahaan.

- 2) Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap kekayaan, utang, pendapatan dan biaya.

Dalam organisasi, setiap transaksi hanya terjadi atas dasar otorisasi dari pejabat yang memiliki wewenang untuk menyetujui kejadiannya transaksi tersebut. Oleh karena itu, dalam organisasi harus dibuat sistem yang mengatur pembagian wewenang untuk otorisasi atas terlaksananya setiap transaksi.

- 3) Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap unit organisasi.

Pembagian tanggung jawab fungsional, sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang telah ditetapkan tidak akan terlaksana dengan baik jika tidak diciptakan cara-cara untuk menjamin praktik yang sehat dalam pelaksanaannya.

- 4) Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya.

Bagaimanapun baiknya struktur organisasi, sistem otorisasi dan prosedur pencatatan, serta berbagai cara yang diciptakan untuk mendorong praktik yang sehat, semuanya sangat tergantung kepada manusia yang melaksanakannya.

Diantara empat unsur pokok pengendalian intern tersebut, unsur mutu karyawan merupakan unsur sistem pengendalian intern yang paling penting. Jika perusahaan memiliki karyawan yang kompeten dan jujur, unsur pengendalian intern yang lain dapat dikurangi sampai batas yang minimum dan perusahaan tetap mampu menghasilkan pertanggung jawaban keuangan yang dapat diandalkan.

### **2.3 Sistem Akuntansi Terkomputerisasi**

Keunggulan utama dari sistem akuntansi yang terkomputerisasi adalah pencatatan serta posting transaksi secara simultan, tingkat akurasi yang tinggi, dan kecepatan pelaporan. Aplikasi akuntansi yang digunakan misalnya *QuickBooks*, *MYOB*, *Accurate*, dan *Simply Accounting*.

Pada sistem yang dibuat secara terintegrasi, proses-proses akuntansi yang perlu dilakukan seperti pada siklus sistem manual diatas telah tercakup dalam satu sistem aplikasi. Proses tersebut telah diotomatisasi melalui fungsi setup (pengaturan) *Chart of Account (COA)*, penjurnalan untuk transaksi bervolume tinggi sekaligus proses posting ke buku besar (*general*

*ledger*) dan pembuatan laporan keuangan, hingga pembukaan periode akuntansi baru. Pada proses ini, maka pemahaman tentang SAK harus dimiliki oleh pengguna sistem agar pengaturan dan *entry* data yang dilakukan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku sehingga hasil akhir dari sistem aplikasi akuntansi memenuhi kualitas laporan keuangan yang dapat diandalkan. Keunggulan sistem yang terintegrasi antara lain:

- 1) Sistem ini dapat menangani proses-proses yang terjadi dalam proses akuntansi secara terkomputerisasi. Hal ini sangat memudahkan pengguna untuk melakukan pembuatan dokumen-dokumen transaksi yang diperlukan.
- 2) Selain itu pengguna dapat menerbitkan laporan keuangan dengan segera ketika diperlukan sebab segala perhitungan yang perlu dilakukan untuk menerbitkan laporan keuangan telah dilakukan oleh sistem.
- 3) Penyimpanan data transaksi dalam *database* akan lebih menjaga keamanan data. Dengan menggunakan DBMS (*Database Management System*) akan lebih memudahkan untuk melakukan perawatan data.
- 4) Pencarian data akan menjadi lebih mudah. Pada sistem ini data pada waktu lampau dapat dicari dengan memasukkan tanggal terjadinya transaksi, kode, ataupun deskripsi transaksi. Jika dibandingkan dengan sistem *file*, tentunya cara ini lebih efektif untuk menangani data transaksi dalam jumlah yang sangat besar.

## **2.4 Laporan Keuangan**

Laporan keuangan adalah beberapa lembar kertas yang bertuliskan angka-angka, yang disajikan secara khas dalam laporan tahunan resmi perusahaan (Brigham dan Houston, 2001:36; Brigham dan Houston, 2009:53). Laporan keuangan melaporkan apa yang sebenarnya terjadi pada aset, laba, dividen, dan laporan arus kas selama beberapa tahun terakhir (Brigham dan Ehrhardt, 2009:49). Perusahaan publik memiliki *stakeholder* yang bervariasi seperti: pemegang saham, pemegang obligasi, *banker*, kreditur, *supplier*, karyawan, dan manajemen. Para *stakeholder* perlu mengetahui bagaimana kinerja perusahaan. Untuk itu mereka bergantung pada laporan keuangan perusahaan yang diumumkan secara periodik untuk menyediakan informasi mendasar tentang kinerja keuangan (*financial performance*) perusahaan. Menurut PSAK No.1, laporan keuangan yang lengkap terdiri dari lima komponen yaitu, Neraca, Laporan laba rugi, Laporan perubahan ekuitas, Laporan arus kas, dan Catatan atas laporan keuangan. Akan tetapi, laporan keuangan

yang dianalisis adalah Laporan laba rugi dan Neraca (Sudana, 2009:15). Selain itu, Catatan atas laporan keuangan juga turut dianalisis dalam penelitian ini.

#### **a. Laporan Laba/Rugi**

Laporan laba/rugi (*income statement*) adalah laporan keuangan yang memperlihatkan penghasilan biaya dan pendapatan bersih dari suatu perusahaan selama satu periode waktu (Sudana, 2009:18). Laba atau *profit* menurut akuntansi berbeda dengan arus kas (*cash flow*). Setidaknya ada 3 alasan untuk mendukung pernyataan ini:

- 1) Akuntansi biasa membagi pembayaran tunai (*cash flows*) menjadi: 1) *current expenditure*, misalnya gaji dan 2) *capital expenditure*, misalnya pembelian mesin.
- 2) Pertimbangan kondisi berikut: pada periode 1 perusahaan memproduksi barang yang dijual pada periode 2 dan dibayar pada periode 3.
- 3) Akuntan biasanya menyesuaikan periode biaya dengan periode pendapatan dari penjualan untuk menghitung laba (konsep *accrual accounting*).

#### **b. Neraca**

Neraca (*balance sheet*) menggambarkan posisi keuangan pada saat atau tanggal tertentu. Pada neraca memperlihatkan posisi aktiva, yang merupakan hasil keputusan investasi yang diambil oleh manajemen perusahaan, dan pasiva, yang merupakan sumber-sumber keuangan untuk mendanai investasi pada aktiva tersebut pada suatu saat tertentu. Akuntansi biasanya mencatat aktiva di neraca berdasarkan harga perolehannya (*historical cost*) yang telah disesuaikan dengan depresiasi. Nilai ini disebut nilai buku (*book value*) (Sudana, 2009:16).

#### **c. Catatan Atas Laporan Keuangan**

Sesuai PSAK No. 1, catatan atas laporan keuangan berisi informasi tambahan atas apa yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, laporan pendapatan komprehensif, laporan laba rugi terpisah (jika disajikan), laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas (IAI, 2009).

### **2.5 Pengembangan Sistem Informasi**

Kebutuhan akan suatu informasi merubah pertumbuhan, kedewasaan dan cara perusahaan bereaksi terhadap serangan dari dalam maupun dari luar. Suatu sistem informasi yang baik harus mampu mengatasi permasalahan-permasalahan baru yang timbul dari perubahan lingkungan bisnis, untuk itu sistem informasi harus disusun dengan tepat. "*The systems development life cycle (SDLC) is a series of steps that companies use to build an*

*information system.*" (Shelly dkk., 1998:1.16). Lima tahap pengembangan sistem adalah (Shelly dkk., 1998:1.16):

### **2.5.1 Perencanaan Sistem (*Systems Planning*)**

Tujuan dari perencanaan sistem adalah untuk mengidentifikasi secara jelas sifat dan daerah permasalahan. Tahap ini dimulai dengan melakukan studi kelayakan operasi, teknis, dan ekonomis. Studi kelayakan operasi dilakukan untuk mengetahui sistem yang dikembangkan layak atau tidak untuk dioperasikan dalam perusahaan. Hal ini dapat dibuktikan jika pemakai tidak menemui kesulitan dengan sistem yang baru dan juga adanya persiapan sumber daya manusia untuk menerima dan mendukung sistem. Studi kelayakan teknis dilakukan untuk mengetahui kemampuan perusahaan untuk menyediakan sumber daya dalam membangun atau membeli, menginstal, dan mengoperasikan sistem. Sedangkan studi kelayakan ekonomis dilakukan untuk mengetahui besarnya manfaat yang didapat dari sistem informasi yang dikembangkan dari biaya-biaya yang diperlukan dan tersedianya dana yang dibutuhkan.

Setelah melakukan studi kelayakan, langkah berikutnya adalah melakukan penyelidikan awal, yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang perlu atau tidaknya meneruskan pengembangan sistem informasi. Hal tersebut dilakukan dengan memahami masalah, mendefinisikan ruang lingkup dan *constraint*, mengidentifikasi manfaat serta mengestimasi waktu dan biaya.

Hasil dari tahap perencanaan sistem ini adalah suatu keputusan mengenai pengembangan sistem yaitu sekedar memerlukan penambahan dengan memperbaiki sistem yang sedang berjalan atau melakukan pengembangan sistem informasi yang baru secara menyeluruh.

### **2.5.2 Menganalisis Sistem (*Systems Analysis*)**

Setelah melakukan perencanaan sistem, tahap kedua dalam pengembangan sistem adalah menganalisis sistem. Tujuan dari tahap ini adalah untuk mengumpulkan dan mencatat sistem yang sedang berjalan dan kebutuhan yang diperlukan oleh sistem dalam mendukung tujuan perusahaan. Langkah-langkah analisis sistem terbagi dalam 3 proses, yaitu :

#### 1) Menentukan keperluan sistem

Mengidentifikasi keperluan sistem merupakan hal yang penting, karena hal ini akan membatasi karakteristik dari pengembangan sistem yang baru dan sebagai pedoman untuk

mengukur kemampuan sistem untuk bisa dijalankan hingga tahap akhir. Penentuan keperluan sistem dibagi dalam 5 kategori, yaitu : keluaran (*output*), masukan (*input*), proses, waktu yang dibutuhkan untuk memproses dan pengendalian.

## 2) Menganalisis keperluan sistem

Dalam proses ini, sistem diuji terhadap masukan, keluaran dan prosesnya, serta cara yang paling mudah untuk menggambarkan keperluan pengembangan sistem yang baru. Analisis ini menggunakan 3 alat utama, yaitu : DFD, Kamus Data, Penjelasan Proses.

## 3) Mengevaluasi berbagai alternatif dan strategi

Dalam proses ini, analisis sistem mengevaluasi alternatif *software*, mempertimbangkan beberapa teknik dan pendekatan pengembangan sistem, serta mempersiapkan perusahaan untuk tahap pengembangan sistem selanjutnya, yaitu mendesain sistem.

### **2.5.3 Mendesain Sistem (*Systems Design*)**

Tujuan dari mendesain sistem adalah untuk membangun sistem yang efektif, terpercaya dan dapat dipertahankan. Untuk menjadi efektif, suatu sistem harus mampu memuaskan kebutuhan pemakai. Suatu sistem dikatakan terpercaya jika dapat menangani kesalahan dengan cepat, yang berasal dari kesalahan proses, masukan maupun dari faktor manusia, karena pada dasarnya kesalahan dapat dicegah. Sistem dapat dipertahankan jika didesain dengan baik, fleksibel, dan dikembangkan dalam suatu modifikasi untuk memenuhi kepentingan masa yang akan datang. Terdapat 4 desain dalam tahap ini, yaitu :

#### 1. Desain Keluaran

Dalam mendesain keluaran, analisis sistem menciptakan desain fisik sistem informasi berdasarkan model logika yang telah dikembangkan dalam tahap penganalisan sistem. Hal yang perlu diperhatikan dalam mendesain keluaran adalah pembuatan kode untuk mempermudah akses informasi, mendesain hasil laporan supaya mudah dipahami pemakai, mendesain tampilan pada layar komputer, dan perangkat yang membantu penyimpanan keluaran seperti *disks* dan *microfilm*.

#### 2. Desain Masukan

Dalam mendesain masukan, analisis sistem akan memfokuskan pada pendesainan *interface* yang *user-friendly* serta proses yang menjamin kualitas, keakuratan, dan ketepatan waktu dari masukan sistem.

Dari tujuan di atas dapat disimpulkan bahwa hal yang perlu mendapat perhatian dalam mendesain masukan adalah cara mendesain data masukan, prosedur masukan, dokumen sumber, tampilan untuk pemasukan data, dan sistem keamanan yang memadai.

Desain masukan yang digunakan untuk mendukung sistem informasi produksi adalah formulir laporan penerimaan bahan, surat permintaan pembelian, bukti penyerahan produksi, dan faktur. Selain itu, juga terdapat beberapa tabel yang diperlukan untuk kepentingan desain *database*.

### 3. Desain *Database*

Analisis sistem dalam tahap ini akan mempelajari struktur data yang diperlukan untuk mendukung tujuan sistem informasi. Penggunaan entity-relationship diagram (ERD) untuk menggambarkan hubungan secara logis antara kesatuan dalam perusahaan sangat diperlukan. "*An entity-relationship diagram (ERD) is a graphical model of the information system that shows the relationship among system entities.*" (Shelly dkk., 1998:8.5).

### 4. Desain Arsitektur Sistem

Tujuan dari tahap ini adalah menentukan bentuk sistem informasi untuk mendukung kebutuhan manajemen secara efektif dengan mendesain jaringan, mendesain perangkat lunak, dan memilih metode proses.

#### **2.5.4 Penerapan Sistem (*Systems Implementation*)**

Tujuan dari penerapan sistem ini adalah untuk mengarahkan fungsi secara tepat dan mendokumentasikan sistem informasi yang telah diuji dan disetujui. Pemakai akan mulai mengoperasikan sistem baru dan hasil dari tahap ini adalah *post-implementation systems evaluation* yang menggambarkan operasi sistem telah dijalankan dengan benar atau sebaliknya. Terdapat 4 pendekatan dasar untuk memulai penggunaan sistem baru, yaitu serentak, paralel, pilot, dan bertahap.

#### **2.5.5 Operasi dan Dukungan Sistem (*Systems Operation and Support*)**

Suatu pemeliharaan dan perbaikan mungkin diperlukan untuk mengatasi masalah yang dihadapi pemakai. Pemeliharaan dilakukan untuk mengoreksi kesalahan yang terjadi. Sedangkan perbaikan merupakan modifikasi yang meningkatkan kemampuan sistem, seperti penyediaan informasi baru dalam laporan.

## 2.6 Penelitian Terdahulu

Standar akuntansi diakui sebagai proses kegiatan sangat politis dan telah dieksplorasi secara luas dalam literatur dan penelitian. Dengan adopsi tersebar luas Standar Pelaporan Keuangan Internasional, Standar Akuntansi Internasional diakui sebagai *standarsetter* yang berlaku secara global. SAK ETAP yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan yang disingkat DSAK dimaksudkan membantu perusahaan kecil menengah dalam menyediakan pelaporan keuangan yang relevan dan andal tanpa terjebak dalam kerumitan standar berbasis Syariah. IAI mempunyai visi bahwa PSAK Syariah harus meningkatkan kesehatan praktik akuntansi di Indonesia secara utuh. Dalam beberapa hal PSAK Syariah memberikan banyak kemudahan untuk perusahaan dibandingkan dengan Standar Akuntansi Keuangan dengan ketentuan pelaporan yang lebih kompleks.

Ramona et al (2009) menyimpulkan bahwa penyusunan Laporan Keuangan yang berstandar internasional bagi semua entitas tanpa akuntabilitas publik merupakan hal yang sangat penting dalam menghadapi globalisasi. Hal ini dikarenakan entitas tanpa akuntabilitas publik pada akhirnya harus menjadi usaha yang besar .

Pacter et al (2009) menyatakan bahwa sudah saatnya entitas tanpa akuntabilitas publik yang jumlahnya lebih banyak menyusun laporan keuangan harus sesuai dengan standar, dan standar yang dipakai adalah IFRS for SME. Namun demikian dia juga menyatakan bagaimana dengan dampak penerapan tersebut. Pacter et al (2009) juga menyatakan penerapan IFRS for SME akan berdampak pada aspek sumberdaya manusia, sosial, teknologi informatika, perpajakan, dan kinerja manajemen.

Lombard (2009) menyatakan bahwa *“Small and medium-sized entities (SMEs) dominate the business world. In virtually every jurisdiction, from the largest economies down to the smallest, over 99% of companies have fewer than 50 employees. There are 21 million SMEs in the European Union, and 20 million in the United States alone “*.

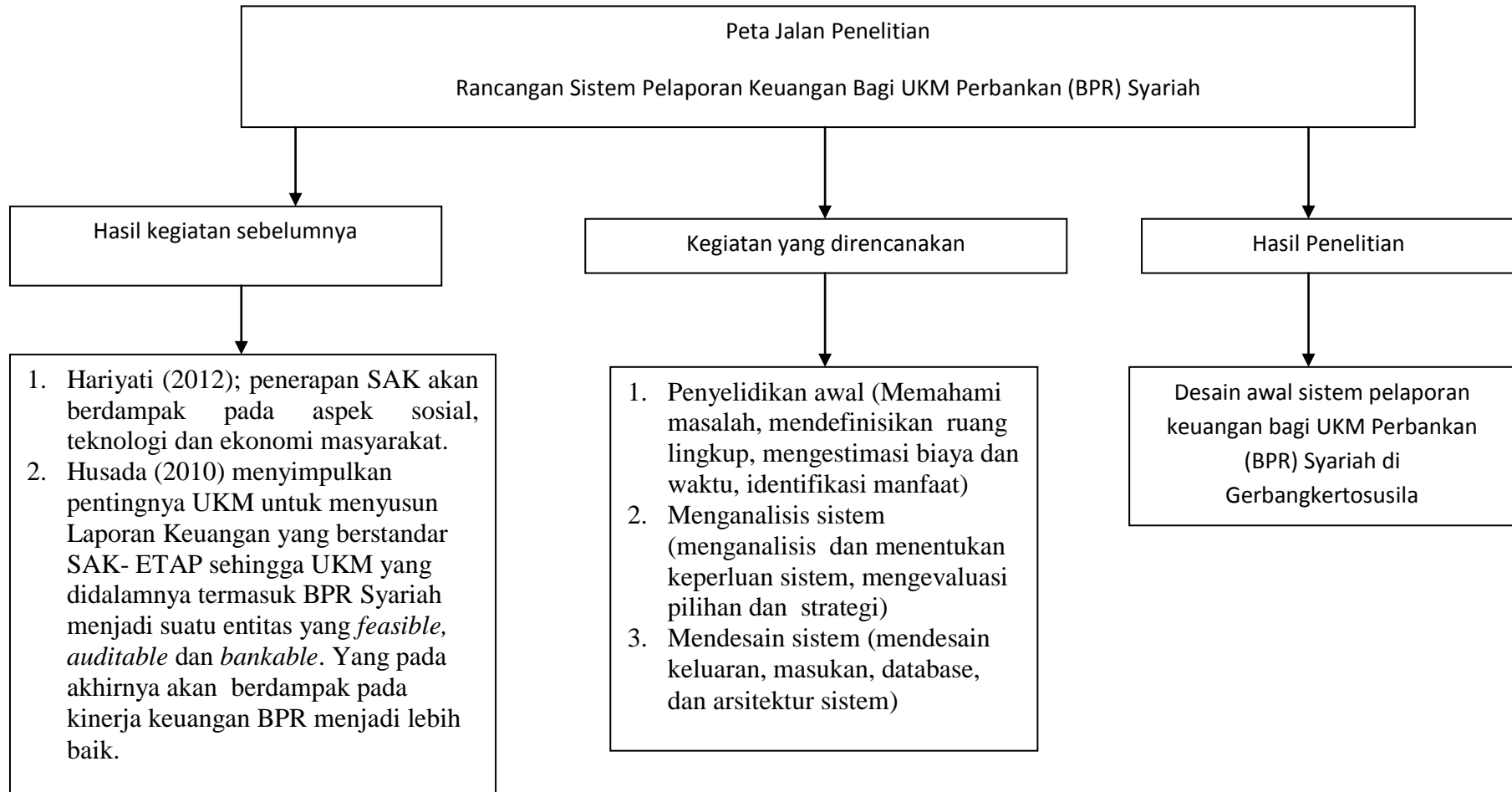
Gassen (2009), menyimpulkan bahwa pengalaman penelitian khusus dan jangka panjang dari para penulis di bidang internasional akuntansi, terdapat pendapat yang berbeda dari pihak ketiga seperti regulator, pemerintah lembaga, pengadilan keadilan, lobi dan kelompok-kelompok profesional atau lmuwan lain terkait dengan penerapan IFRS for SMEs. Dia juga menyimpulkan bahwa beberapa tujuan yang mungkin membutuhkan beberapa set standar disesuaikan. Sepanjang, IASB melayani permintaan publik perusahaan yang terdaftar, pasar modal global dan mereka peserta. Sebagai perusahaan UKM beroperasi di lingkungan lain dari perusahaan publik yang terdaftar berorientasi internasional, dalam penelitian ini jelas

diidentifikasi bahwa tujuan akuntansi keuangan untuk UKM berbeda dari tujuan perusahaan publik. Sebaliknya, IASB tampaknya percaya bahwa konsep-konsep dan prinsip tidak akan diaplikasikan secara penuh dari IFRS karenanya ada yang harus dibedakan antara IFRS penuh dan IFRS for SME.

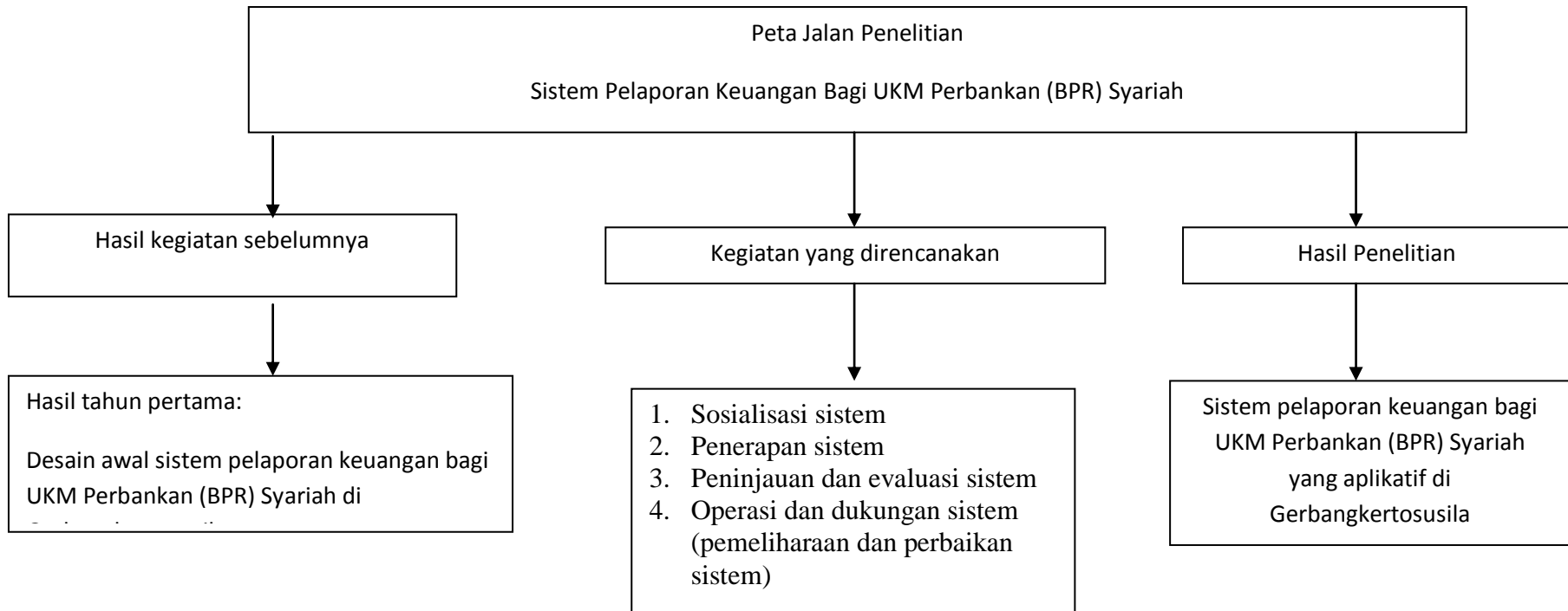
Hal yang sama juga dikemukakan oleh Husada (2010) dalam artikelnya IFRS untuk UKM, yang menyimpulkan pentingnya UKM untuk menyusun Laporan Keuangan yang berstandar SAK- ETAP sehingga UKM yang didalamnya termasuk BPR menjadi suatu entitas yang *feasible*, *auditable* dan *bankable*. Yang pada akhirnya akan berdampak pada kinerja keuangan BPR menjadi lebih baik.

Singh (2009) juga menyatakan pentingnya standar akuntansi bagi entitas yang tidak berakuntabilitas publik (*small medium enterprise*). Karena diharapkan perusahaan-perusahaan kecil yang tidak berakuntabilitas publik pada akhirnya menjadi perusahaan besar, namun disini tidak dibahas dampak dari penerapan standar tersebut. Dari beberapa penelitian tersebut diatas mengindikasikan bahwa standar akuntansi untuk UKM, terutama UKM Perbankan merupakan hal penting.

## 2.7 Peta Jalan Penelitian



Gambar 2.1 Peta Jalan Penelitian Tahun Pertama



Gambar 2.2 Peta Jalan Penelitian Tahun Kedua

## **BAB III**

### **TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN**

#### **3.1 Tujuan Penelitian**

Perancangan sistem pelaporan keuangan yang berstandar PSAK Syariah ini secara jangka pendek bertujuan untuk mendukung harmonisasi laporan keuangan BPR di wilayah Jawa Timur dan secara jangka panjang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi operasional BPR Syariah yang pada akhirnya secara tidak langsung meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena tugas dan fungsi pokok BPR Syariah adalah menyimpan dan menyalurkan kredit bagi usaha mikro.

#### **3.2 Manfaat Penelitian**

##### **3.1.1 Manfaat Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan dan menambah wawasan keilmuan dalam bidang akuntansi syariah terutama mengenai BPR Syariah.

##### **3.1.2 Manfaat Praktis**

- a. Diharapkan dapat menjadi informasi bagi BPR Syariah di Gerbangkertosusila yang dapat digunakan sebagai referensi, khususnya terkait dengan pelaporan keuangan dan sistem informasi akuntansi.
- b. Sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian selanjutnya yang terkait dengan akuntansi syariah khususnya pelaporan keuangan syariah.

## **BAB IV**

### **METODE PENELITIAN**

#### **4.1. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif-kualitatif. Fokusnya adalah menggambarkan secara menyeluruh tentang bentuk dan fungsi. Penelitian deskriptif kualitatif berusaha menggambarkan suatu gejala sosial. Dengan kata lain penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat studi. Metode kualitatif ini memberikan informasi yang lengkap sehingga bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan serta lebih banyak dapat diterapkan pada berbagai masalah. Metode penyelidikan deskriptif tertuju pada pemecahan masalah yang ada pada masa sekarang. Metode ini menuturkan, menganalisa, dan mengklasifikasi; menyelidiki dengan teknik survey, interview, angket, observasi, atau dengan teknik test; studi kasus, studi komperatif, studi waktu dan gerak, analisa kuantitatif, studi kooperatif atau operasional. Bisa disimpulkan bahwa metode deskriptif ini ialah metode yang menuturkan dan menafsirkan data yang ada, misalnya tentang situasi yang dialami, satu hubungan, kegiatan, pandangan, sikap yang menampak, atau tentang satu proses yang sedang berlangsung, pengaruh yang sedang bekerja, kelainan yang sedang muncul, kecenderungan yang menampak, pertentangan yang meruncing, dan sebagainya.

Menurut Yin (2003), Studi kasus adalah suatu penelitian strategi yang terpusat dalam memberikan pengertian secara tunggal dengan latar tunggal. Penelitian dalam studi kasus ini akan memaksimalkan empat aspek kualitas desannya, yaitu : validitas konstruk, validitas internal, validitas eksternal dan reliabilitas. Dalam studi kasus ini dapat mencakup kasus tunggal dan dapat mencakup kasus ganda dengan sejumlah tingkat analisis. Bogdan dan Taylor (Moleong, 1998:3) mendefinisikan metodologi kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan ini diarahkan pada latar dan individu tersebut secara utuh, sehingga dalam hal ini tidak boleh mengisolasi individu ke dalam variabel atau hipotesis.

Ciri-ciri metode deskriptif itu sendiri adalah memusatkan diri pada pemecahan masalah-masalah yang ada pada masa sekarang, pada masalah-masalah yang aktual, kemudian data yang dikumpulkan mula-mula disusun, dijelaskan, dan kemudian dianalisa

(karena itu metode ini sering pula disebut metode analitik). Sifat-sifat lainnya adalah sama seperti pada setiap metode penyelidikan secara umum. Untuk memperoleh hasil sebesar-besarnya, seorang penyelidik umumnya mengusahakan agar :

1. Menjelaskan setiap langkah penyelidikan deskriptif itu dengan teliti dan terperinci, baik mengenai dasar-dasar metodologi maupun mengenai detail teknik secara khusus.
2. Menjelaskan prosedur pengumpulan data, serta pengawasan dan penilaian terhadap data itu.
3. Memberi alasan yang kuat mengapa dalam metode deskriptif tersebut penyelidik menggunakan teknik tertentu dan bukan teknik lainnya. (Winarno, 1994)

Penelitian ini mengambil lokasi pada UKM Perbankan (BPR) Syariah di wilayah GERBANGKERTOSUSILA, Jawa Timur.

#### **4.2. Sumber dan jenis data**

Menurut Moloeng (1998), sumber data paling utama dari penelitian dengan pendekatan alternative adalah kata-kata dan tindakan. Selebihnya adalah tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Sumber dan jenis data dalam penelitian ini diperoleh dari :

- a) *Key informan* (informasi kunci), yaitu semua pihak pimpinan atau pemilik perusahaan. Dalam hal ini pengambilan sampel bersifat teoritik sampling dan *snowball sampling* artinya penarikan sampel dalam penelitian dengan pendekatan kualitatif ini dimaksudkan untuk memilih responden yang benar-benar relevan dan kompeten dengan masalah yang akan diteliti dan dilakukan secara berulang-ulang.
- b) Tempat dan peristiwa, yang meliputi : lokasi penelitian, fasilitas yang tersedia, keadaan perusahaan, kondisi budaya perusahaan dan peristiwa-peristiwa yang relevan dengan kasus.
- c) Dokumen-dokumen perusahaan yang relevan dengan permasalahan dan fokus penelitian. Menurut Yin (1996) ada enam sumber bukti yaitu ; dokumentasi, rekaman arsip, wawancara, observasi langsung, observasi partisipan, dan perangkat fisik.

#### **4.3. Teknis Analisis Data**

Starus dan kobin (2003), menjelaskan bahwa proses analisis data dalam penelitian kualitatif meliputi tahap sebagai berikut :

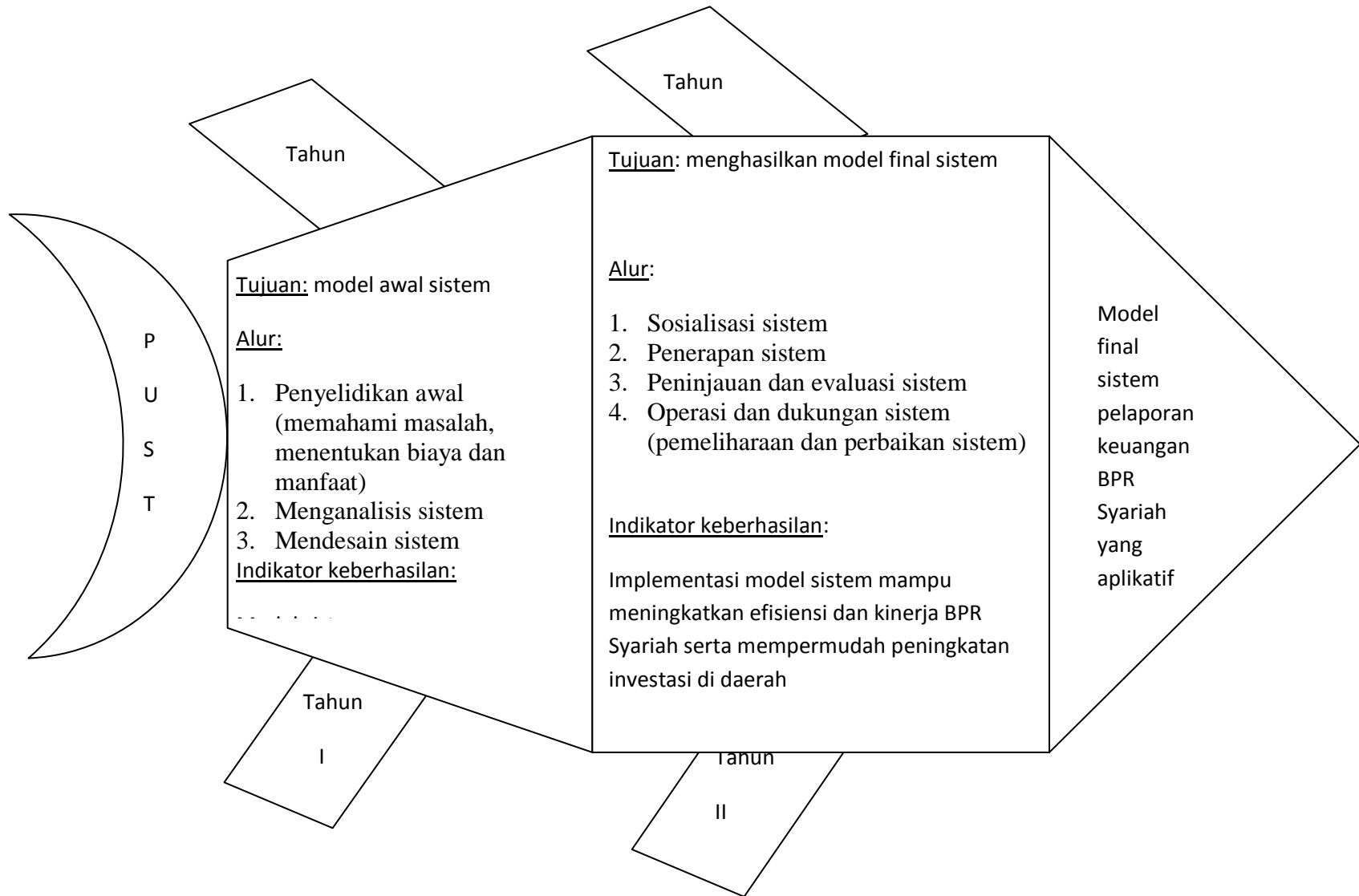
- a) *Open coding*, meliputi proses pengungkapan, perincian membandingkan, mengkonseptualisasikan data. Hasil-hasilnya ditekankan pada labelisasi konsep dan

kategorisasi data yang diperoleh sertamengembangkan kategori berdasarkan properties dan dimensi yang relevan dengan fokus masalah penelitian.

- b) *Axial coding*, dalam tahap ini kategori-kategori yang sudah relevan dengan fokus tersusun dalam tahap *open coding* diorganisasikan sesuai dengan label kerangka model *paradigma grounded theory*.
- c) *Selective coding*, dalam tahap ini dilakukan proses memeriksa adanya kategori ini berkaitan dengan kategori yang lainnya. Kategori ini ditemukan melalui perbandingan hubungan antara kategori dengan menggunakan model paradigma. Kemudian memeriksa hubungan kategori dan akhirnya menghasilkan *general design*.

#### **4.4. Tahapan (Alur) Penelitian**

Adapun tahapan penelitian dapat dilihat pada alur tahapan penelitian pada halaman berikut :



## **BAB V**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **5.1. Hasil Penelitian**

BPRS yang dijadikan sebagai obyek penelitian adalah BPRS di GERBANG KERTOSUSILO. Sesuai dengan masukan dari Kepala Divisi Pengawas Syariah di Jawa Timur, maka BPRS yang menjadi obyek dalam penelitian ini yang memiliki total aset minimal sebesar 10 Milyar sehingga diharapkan memiliki transaksi yang cukup banyak dan kompleks sehingga layak untuk dijadikan obyek yang diteliti. Selain itu BPRS yang memiliki total aset minimal 10 Milyar sudah harus diaudit oleh KAP. Sehingga dalam pelaporannya harus sesuai SAK Syariah. Adapun BPRS yang menjadi obyek penelitian meliputi:

1. BPRS Amanah Sejahtera di Gresik
2. BPRS Bakti Makmur Indah di Krian, Sidoarjo
3. BPRS Karya Mugi Sentosa di Surabaya
4. BPRS Kota Mojokerto di Mojokerto
5. BPRS Mandiri Mitra di Gresik

Data yang dibutuhkan dan berhasil dikumpulkan dalam penelitian ini meliputi:

1. SOP Struktur Organisasi BPRS untuk tiga BPRS

#### **SOP Struktur Organisasi PT BPR Syariah Kota Mojokerto.**

Dalam struktur organisasi BPRS Kota Mojokerto, tanggung jawab tertinggi berada pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Sedangkan Dewan Komisaris berada di bawah RUPS namun membawahi Dewan Direksi. RUPS dan Dewan Direksi akan diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini akan memiliki kewenangan yang penuh dalam melaksanakan pengawasan terhadap semua kegiatan BPRS. Dewan Pengawas Syariah terdiri dari ketua dan satu anggota. Sedangkan Dewan Direksi membawahi lima bagian antara lain: *marketing*, *legal officer*,

SDM/Umum/Sekretariat, operasional, dan kepala kantor. Bagian SDM akan membawahi *office boy*, *driver*, dan *security*. Bagian operasional akan membawahi *teller* dan *customer service*, *customer service* ini akan koordinasi dengan petugas *payment*.

### **SOP Struktur Organisasi PT BPRS AMANAH SEJAHTERA**

Struktur organisasi BPRS ini sama dengan BPRS lainnya bahwa pemegang kekuasaan tertinggi adalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS ini membawahi Dewan komisaris dan Dewan Direksi. Hubungan *staffing* ini dalam pengawasan Dewan pengawas syariah. Direksi dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh staff direksi. Direksi ini membawahi tiga bagian yaitu: Manager Internal Audit dan Litbang, Manager Keuangan, dan Manager Legal, Personalia dan Umum.

BPRS Amanah Sejahtera ini juga memiliki koperasi-koperasi yang bertanggung jawab pada Direksi melalui manager masing-masing bagian. Koperasi tersebut terdiri atas: koperasi pusat, koperasi cabang Surabaya, koperasi cabang Lamongan, dan koperasi cabang Cerme Gresik. Koperasi memiliki bagian *marketing*, *legal*, operasional, serta kantor kas.

### **SOP Struktur Organisasi PT BPRS BAKTI MAKMUR INDAH KRIAN**

Struktur organisasi BPRS Baktimakmur Indah memiliki kekuasaan tertinggi pada Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). RUPS ini akan membawahi *Board of Commisioner* dan *Board of Sharia Commisioner*. Adapun di antara kedua dewan tersebut dilakukan koordinasi. Kedua Dewan komisaris ini membawahi *Board of Director/President Director*. Dewan ini membawahi Satuan Kerja Audit Internal, *Corporate Secretary & HRD*, *IT & Bisnis Accounting*, dan *Remedial, Legal & Marketing Corporate*. Direktur juga akan membawahi Kantor cabang Ampel, Kantor cabang Candi, Operasional kantor pusat Krian, Kantor Cabang Sepanjang, Kantor Cabang Mojokerto, dan Kantor cabang Mojosari.

Ada dua PT BPRS yang tidak memberi data struktur organisasi yaitu BPRS Mandiri Mitra Gresik dan BPRS Karya Mugi Sentosa, Surabaya.

2. *Chart of Account* (COA) (terlampir)

COA yang berhasil dikumpulkan tim peneliti meliputi: BPRS Kota Mojokerto, BPRS Karya Mugi Sentosa Surabaya serta BPRS Amanah Sejahtera Gresik. Sedangkan dua BPRS Mandiri Mitra dan Bakti Makmur tidak memberikan data COA.

3. Laporan keuangan publikasi untuk semua BPRS (terlampir)

Laporan keuangan publikasi yang ada untuk semua BPRS, namun laporan keuangan yang dimaksud sesuai standar Bank Indonesia.

## **Pembahasan**

### **Sistem Pelaporan Keuangan BPRS di GERBANG KERTOSUSILA**

Secara umum sistem pelaporan keuangan BPRS di GERBANG KERTOSUSILA mengikuti format yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Laporan keuangan yang dipublikasikan menurut Bank Indonesia meliputi: Neraca; Laporan laba rugi; Laporan sumber dan penggunaan dana zakat, infak, dan shadaqah; Laporan sumber dan penggunaan dana qardhul hasan; Laporan perubahan dana investasi dana terikat; Distribusi Bagi Hasil; Laporan Komitmen dan Kontijensi; dan Laporan Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi lainnya.

Sedangkan Laporan Keuangan sesuai PSAK Syariah, PSAK No. 101 menyebutkan laporan keuangan bank syariah yang lengkap terdiri dari: Laporan Posisi Keuangan (Neraca); Laporan Laba Rugi Komprehensif; Laporan Arus Kas; Laporan Perubahan Ekuitas; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat, Infak, dan Shadaqah; Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan (Qardhul Hasan); serta Catatan Atas Laporan Keuangan.

Perbedaan pelaporan keuangan antara format BI dengan SAK syariah tersaji dalam tabel 5.1.

Tabel 5.1. Perbedaan Format Laporan Keuangan BI dan PSAK Syariah

No	Format Laporan Keuangan Bank Indonesia	Format Laporan Keuangan PSAK Syariah
1	Neraca	Neraca
2	Laba Rugi	Laba Rugi
3	Komitmen dan Kontigensi	Arus Kas
4	Laporan Kualitas Aktiva Produktif dan Informasi Lainnya	Perubahan Ekuitas
5	Laporan Sumber dan penggunaan ZIS	Laporan Sumber dan Penggunaan Zakat
6	Laporan Distribusi Bagi Hasil	Komitmen dan Kontijensi
7	Laporan Dana Investasi Terikat	Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan
8		Perubahan Dana Investasi Terikat
9		Rekonsiliasi Pendapatan dan Bagi Hasil

Hasil Identifikasi Kesesuaian Antara Format Laporan Keuangan BPRS dengan Standar Pelaporan Bank Indonesia bahwa Laporan keuangan BPRS yang ada telah sesuai dengan standar pelaporan bank Indonesia. BPRS mengikuti standar pelaporan bank Indonesia karena terdapat kewajiban untuk publikasi pada *website* Bank Indonesia. Namun, laporan keuangan berdasarkan format laporan keuangan BPRS belum sesuai dengan PSAK Syariah. Hal ini dikarenakan BPRS mengikuti format pelaporan yang disyaratkan oleh Bank Indonesia, Akan tetapi laporan keuangan berdasarkan aturan Bank Indonesia belum sesuai dengan standar PSAK Syariah.

#### **Format Sistem Penamaan/kode Akun (*Chart of Account*) BPRS**

Bank Indonesia tidak memiliki standar format penamaan akun yang tertuang dalam kode akun. Bank Indonesia hanya memberikan standar format untuk pelaporan keuangan. Terdapat beberapa ketidaksamaan penamaan akun di BPRS dengan Penamaan Akun di PSAK Syariah. Bank Indonesia tidak memiliki standar format penamaan akun yang tertuang dalam kode akun. Bank Indonesia hanya memberikan standar format untuk pelaporan keuangan. Berkaitan dengan penamaan/kode akun yang berbeda disajikan dalam tabel 5.2.

## **BPRS Kota Mojokerto**

Pada BPRS ini terdapat akun Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah yang diakui sebagai aktiva di sub aktiva pembiayaan. Sesuai PSAK Syariah no.101 seharusnya akun ini dikategorikan sebagai investasi mudharabah dan investasi musyarakah bukan aktiva pembiayaan. Selanjutnya Piutang Transaksi Multijasa yang seharusnya dikategorikan sebagai pembiayaan ijarah sesuai PSAK Syariah, ternyata dilaporkan terpisah. Penyisihan Penghapusan Aktiva, transaksi ini seharusnya di cek kesesuaiannya di PSAK Syariah, karena transaksi ini tidak dijabarkan dalam PSAK Syariah. Beban Pendirian, beban ini di kategorikan dalam aktiva, seharusnya beban pendirian ini dimasukkan ke akun ekuitas terutama dalam Modal Tambahan. Pendapatan Yadit, pendapatan ini dikategorikan dalam aktiva, seharusnya pendapatan yadit dimasukkan ke akun kelompok komitmen dan kontijensi. Persediaan Bahan Habis Pakai, akun ini sebaiknya disesuaikan dengan akun yang ada di PSAK Syariah, karena PSAK Syariah tidak menjelaskan tentang akun ini. Bagi Hasil yang sudah jatuh tempo, akun ini sebaiknya dirubah dengannama bagi hasil yang belum dibagikan agar sesuai dengan PSAK Syariah, karena nama akun ini tidak sesuai dengan nama akun yang ada di PSAK Syariah. Dana Investasi Tidak Terikat, akun ini di BPRS Mojokerto dimasukkan dalam kategori kewajiban. Akun ini dikategorikan sebagai kewajiban jika nama akun Dana Investasi Terikat. Jika akun ini adalah Dana Investasi Tidak Terikat, akun ini disajikan secara terpisah dari kewajiban dalam PSAK karena Akun dana investasi tidak terikat dikategorikan sebagai Dana Syirkah Temporer. Dari Bank Indonesia, nama dari akun ini tidak lengkap, seharusnya akun ini dikategorikan sebagai akun Pendapatan Penempatan Pada Bank Indonesia. Pendapatan Fee Wakalah, Fee Kafalah, dan Fee Hiwalah, nama akun ini disajikan sebagai pendapatan operasional lainnya. Seharusnya akun ini dikategorikan dalam akun pendapatan jasa operasional lainnya. Pendapatan QARDH, akun pendapatan QARDH mohon dicek kesesuaiannya di PSAK Syariah karena akun tersebut tidak dijabarkan dalam PSAK Syariah. Beban Pihak Ketiga Bukan Bank, akun ini dikategorikan dalam beban operasional. Seharusnya akun ini dikategorikan dalam Akun Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil sebagai pengurang pendapatan operasional

utama. Zakat, akun zakat dikategorikan sebagai beban di BPRS ini. Akun ini seharusnya dilaporkan terpisah dari kategori pendapatan dan beban.

### **BPRS Karya Mugi Sentosa**

BPRS Karya Mugi Sentosa, Tabungan dan Deposito Pada Bank Lain secara umum akun ini belum dikelompokkan sesuai kategorinya. Seharusnya akun ini dikelompokkan sesuai dengan kategorinya. Cadangan PPAP Bnk-Bank Lain, akun ini sebaiknya dicek kesesuaiannya di PSAK Syariah, karena akun ini tidak dijabarkan dalam PSAK Syariah. Piutang Multijasa, akun ini di BPRS Karya Mugi Sentosa tidak dikategorikan sebagai akun Ijarah, sebaiknya akun ini dikategorikan ke dalam pembiayaan ijarah. Pendapatan Multijasa akun ini di kategorikan sebagai aktiva, sebaiknya akun ini dikategorikan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi. Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah, akun ini diakui sebagai aktiva di sub aktiva pembiayaan, sebaiknya akun ini dikategorikan sebagai investasi mudharabah dan investasi musyarakah. Penyertaan Lainnya, di BPRS akun ini tidak dijelaskan bentuk transaksinya, sebaiknya akun ini di jelaskan bentuk transaksinya. Piutang Kepada Pembeli Murabahah, akun ini disajikan sebagai piutang kepada pembeli, sebaiknya akun ini disajikan sebagai pembiayaan murabahah. Rekening Antar Kantor, mohon akun ini di cek kesesuaiannya dengan PSAK Syariah, karena akun ini tidak dijabarkan dalam PSAK Syariah. Pendapatan Administrasi Qardh, akun ini mohon di cek kesesuaiannya dengan PSAK Syariah, karena akun ini di PSAK Syariah tidak menjabarkan. Beban Personalia, akun ini dikategorikan dalam akun kewajiban, karena akun ini dikategorikan sebagai beban, maka sebaiknya nama akun ini diganti dengan nama akun kewajiban segera. Seluruh Pendapatan Administrasi, akun ini disajikan terpisah tanpa ada pengkategorian. Seluruh akun Pendapatan Administrasi yang diterima oleh Bank di luar pendapatan operasional utama, dikategorikan tersendiri dalam pendapatan operasional lainnya.

### **BPRS Amanah Sejahtera**

Giro dan Tabungan, pada BPRS Amanah Sejahtera Giro dan Tabungan akun ini dikategorikan dalam penempatan pada bank, sebaiknya akun ini disajikan terpisah tanpa ada pengkategorian. Pendapatan atas piutang YADT, akun ini disajikan dalam aktiva. Sebaiknya akun ini dikategorikan pada akun komitmen dan kontigensi. Pembiayaan RAHN, akun ini mohon dicek kesesuaiannya di PSAK Syariah. Karena akun ini tidak dijabarkan dalam PSAK Syariah. Capital Lease, akun ini dikategorikan dalam aktiva tetap dan inventaris, sebaiknya akun ini dikategorikan dalam aktiva ijarah. Tabungan dan Deposito Mudharabah, Akun ini seharusnya masuk ke dalam akun dana syirkah. Dan di PSAK Syariah tidak mengatur. Rekening Antar Kantor, akun ini mohon dicek kesesuaiannya dengan PSAK Syariah, karena di PSAK Syariah tidak menjabarkan akun ini. Beban Administrasi dan Pembiayaan, akun ini dikategorikan sebagai pendapatan operasional, sebaiknya akun ini dikategorikan sebagai pendapatan operasional lainnya. Semua Akun Beban, akun ini tidak dikategorikan dengan baik, sebaiknya akun ini dikategorikan sesuai dengan fungsinya.

Tabel 5.2. Hasil Identifikasi Kode Akun Antara BPRS dengan PSAK Syariah

No	Nama BPRS	Akun	Keterangan Identifikasi	Saran
1	PT. BPRS Kota Mojokerto	Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah	Akun ini diakui sebagai aktiva di sub aktiva pembiayaan.	Seharusnya dikategorikan sebagai investasi mudharabah dan investasi musyarakah.
2	PT. BPRS Kota Mojokerto	Piutang Transaksi Multijasa	Terpisah dengan pembiayaan ijarah.	Seharusnya dikategorikan sebagai pembiayaan ijarah.
3	PT. BPRS Kota Mojokerto	Penyisihan Penghapusan Aktiva	Transaksi tidak dijabarkan dalam PSAK Syariah.	Mohon di cek kesesuaian akun di PSAK Syariah.
4	PT. BPRS Kota Mojokerto	Beban Pendirian	Dikategorikan dalam aktiva.	Seharusnya dimasukkan ke ekuitas (Modal Tambahan).
5	PT. BPRS Kota Mojokerto	Pendapatan Yadit	Dikategorikan dalam aktiva	Seharusnya dimasukkan ke akun kelompok komitmen dan kontijensi.
6	PT. BPRS Kota Mojokerto	Persediaan Bahan Habis Pakai	Tidak dijelaskan dalam PSAK Syariah.	Mohon di cek kesesuaian akun di PSAK Syariah.
7	PT. BPRS Kota Mojokerto	Bagi Hasil yang sudah jatuh tempo	Nama tidak sesuai dengan yang ada pada PSAK Syariah	Seharusnya akun ini diganti dengan nama bagi hasil yang belum dibagikan agar sesuai dengan PSAK Syariah
8	PT. BPRS Kota Mojokerto	Dana Investasi Tidak Terikat	Dimasukan pada kategori kewajiban	Dikategorikan sebagai kewajiban jika nama akunya adalah Dana Investasi Terikat. Jika nama akunya adalah Dana Investasi Tidak Terikat, akun ini disajikan secara terpisah dari kewajiban.

No	Nama BPRS	Akun	Keterangan Identifikasi	Saran
				Dalam PSAK, akun dana investasi tidak terikat dikategorikan sebagai Dana Syirkah Temporer.
9	PT. BPRS Kota Mojokerto	Dari Bank Indonesia	Nama akun tidak lengkap	Seharusnya akun ini dikategorikan Pendapatan Penempatan Pada Bank Indonesia.
10	PT. BPRS Kota Mojokerto	Pendapatan Fee Wakalah, Fee Kafalah dan Fee Hiwalah	Nama akun ini disajikan sebagai pendapatan operasional lainnya.	Seharusnya akun ini dikategorikan sebagai pendapatan jasa operasional lainnya.
11	PT. BPRS Kota Mojokerto	Pendapatan QARDH	Transaksi pendapatan QARDH tidak di jabarkan dalam PSAK Syariah.	Mohon di cek kesesuaian akun di PSAK Syariah.
12	PT. BPRS Kota Mojokerto	Beban Pihak Ketiga Bukan Bank	Akun ini dikategorikan dalam beban operasional.	Seharusnya dikategorikan dalam Akun Hak Pihak Ketiga Atas Bagi Hasil sebagai pengurang pendapatan operasional utama.
13	PT. BPRS Kota Mojokerto	Zakat	Akun ini dikategorikan sebagai beban.	Akun ini seharusnya dilaporkan terpisah dari kategori pendapatan dan beban.
14	BPRS Karya Mugi Sentosa	Tabungan dan Deposito Pada Bank Lain	Secara umum akun ini belum dikelompokan sesuai kategorinya.	Seharusnya akun ini dikelompokan sesuai dengan kategorinya.
15	BPRS Karya Mugi Sentosa	Cadangan PPAP Bank-Bank Lain	Akun ini harusnya tidak di jabarkan dalam PSAK Syariah.	Mohon di cek kesesuaian akun di PSAK Syariah.
16	BPRS Karya Mugi Sentosa	Piutang Multijasa	Tidak dikategorikan sebagai akun ijarah.	Seharusnya dikategorikan sebagai pembiayaan ijarah.

No	Nama BPRS	Akun	Keterangan Identifikasi	Saran
17	BPRS Karya Mugi Sentosa	Pendapatan Multijasa	Akun ini dikategorikan sebagai aktiva	Seharusnya akun ini dikategorikan sebagai pendapatan dalam laporan laba rugi.
18	BPRS Karya Mugi Sentosa	Pembiayaan Mudharabah dan Pembiayaan Musyarakah	Akun ini diakui sebagai aktiva di sub aktiva pembiayaan.	Seharusnya dikategorikan sebagai investasi mudharabah dan investasi musyarakah.
19	BPRS Karya Mugi Sentosa	Penyertaan Lainnya	Tidak dijelaskan bentuk transaksinya.	Akun ini dijelaskan bentuk transaksinya.
20	BPRS Karya Mugi Sentosa	Piutang Kepada Pembeli Murabahah	Akun ini disajikan piutang kepada pembeli.	Akun ini disajikan sebagai pembiayaan murabahah.
21	BPRS Karya Mugi Sentosa	Rekening Antar Kantor	Tidak di jabarkan dalam PSAK Syariah.	Mohon di cek kesesuaian akun di PSAK Syariah.
22	BPRS Karya Mugi Sentosa	Pendapatan Administrasi Qardh	Akun ini harusnya tidak di jabarkan dalam PSAK Syariah.	Mohon di cek kesesuaian akun di PSAK Syariah.
23	BPRS Karya Mugi Sentosa	Beban Personalia	Akun ini dikategorikan dalam akun kewajiban.	Jika Akun ini dikategorikan sebagai beban, maka nama akun perlu diganti dengan kewajiban segera
24	BPRS Karya Mugi Sentosa	Seluruh Pendapatan Administrasi	Disajikan terpisah tanpa ada pengkategorian.	Seluruh akun Pendapatan Administrasi yang diterima oleh Bank di luar pendapatan operasional utama, dikategorikan tersendiri dalam pendapatan operasional lainnya
25	BPRS Syariah Amahan	Giro dan Tabungan	Giro dan Tabungan pada Bank Lain disajikan terpisah tanpa ada pengkategorian	Akun ini dikategorikan dalam penempatan pada

No	Nama BPRS	Akun	Keterangan Identifikasi	Saran
	Sejahtera			bank
26	BPRS Syariah Amahan Sejahtera	Pendapatan atas piutang YADT	Akun ini disajikan dalam aktiva	Akun ini dikategorikan pada akun komitmen dan kontigensi
27	BPRS Syariah Amahan Sejahtera	Pembiayaan RAHN	Akun ini harusnya tidak dijabarkan dalam PSAK Syariah.	Mohon di cek kesesuaian akun di PSAK Syariah.
28	BPRS Syariah Amahan Sejahtera	Capital Lease	Akun ini dikategorikan dalam aktiva tetap dan inventaris	Seharusnya akun ini dikategorikan dalam aktiva ijarah
29	BPRS Syariah Amahan Sejahtera	Tabungan dan Deposito Mudharabah		Akun ini seharusnya masuk ke dalam akun dana syirkah.
30	BPRS Syariah Amahan Sejahtera	Rekening Antar Kantor	Tidak di jabarkan dalam PSAK Syariah.	Mohon di cek kesesuaian akun di PSAK Syariah.
31	BPRS Syariah Amahan Sejahtera	Beban Administrasi dan Pembiayaan	Dikategorikan sebagai pendapatan operasional	Seharusnya akun ini dikateogrikan sebagai pendapatan operasional lainnya
32	BPRS Syariah Amahan Sejahtera	Semua Akun Beban	Akun ini tidak dikategorikan dengan baik	Akun ini dikategorikan sesuai dengan fungsinya.

Sumber: data diolah penulis

Berdasarkan perbedaan yang ada maka dapat disusun desain rancangan laporan keuangan yang sesuai standar Bank Indonesia serta sesuai Standar Akuntansi Keuangan Syariah (SAK Syariah). Rancangan laporan keuangan yang disusun hanya berdasarkan penamaan saja tanpa menentukan kode akun yang dilaporkan dalam laporan keuangan BPRS. Hal ini disebabkan agar BPRS dapat menggunakan nama akun tersebut tanpa melakukan perubahan kode akun. Apabila kode akun diubah maka hal ini akan berdampak pada perubahan program akuntansi yang telah ada. Apalagi beberapa BPRS yang telah menjadi obyek penelitian ini baru melakukan perubahan system akuntansi, sehingga dikhawatirkan apabila kode akun diubah dapat merubah seluruh system akuntansi yang telah ada. Oleh karena itu dalam desain rancangan system pelaporan keuangan ini hanya berdasarkan penamaan akun saja. Desain system pelaporan disajikan dalam tabel 5.3 sampai dengan tabel 5.5.

Selain beberapa hasil terkait adanya perbedaan antara PSAK Syariah dengan standar Bank Indonesia tentang laporan keuangan BPRS, juga ditemukan beberapa hal yang masih belum konsisten dari pihak IAI yaitu:

1. PSAK Syariah masih menggunakan kata aktiva dan pasiva, padahal PSAK ETAP dan PSAK Berbasis IFRS sudah menggunakan kata aset dan kewajiban.
2. PSAK Syariah belum menampilkan kategori akun terkait dengan inventaris dan persediaan.

## **BAB 6**

### **RENCANA TAHAPAN BERIKUTNYA**

Berdasarkan desain awal sistem pelaporan keuangan bagi UKM Perbankan (BPR) Syariah di Gerbangkertosusila yang dihasilkan pada penelitian tahun pertama, maka pada tahun berikutnya direncanakan akan dilakukan:

1. Koordinasi dengan pihak Bank Indonesia terkait temuan tahun pertama.
2. Koordinasi dengan pihak Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) terkait temuan tahun pertama.
3. Sosialisasi sistem pelaporan keuangan bagi UKM Perbankan (BPR) Syariah di Gerbangkertosusilo.
4. Penerapan sistem pelaporan keuangan bagi UKM Perbankan (BPR) Syariah di Gerbangkertosusilo.
5. Peninjauan dan evaluasi tentang penerapan sistem pelaporan keuangan bagi UKM Perbankan (BPR) Syariah di Gerbangkertosusilo.
6. Berdasarkan hasil tahap 5 diharapkan Sistem pelaporan keuangan bagi UKM Perbankan (BPR) Syariah yang telah dihasilkan aplikatif, sehingga tahun berikutnya dapat disusun program untuk sistem pelaporan tersebut. Program ini diharapkan dapat diajukan sebagai HAKI tim peneliti.

## **BAB 7**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **7.1. Simpulan**

Secara umum, bentuk laporan keuangan BPRS masih belum sesuai dengan SAK Syariah, namun telah memenuhi syarat peraturan Bank Indonesia. Hal ini juga disebabkan adanya beberapa penamaan/kode akun yang berbeda antara Bank Indonesia dengan SAK Syariah.

#### **7.2. Saran**

Bagi pihak Bank Indonesia serta Dewan Pembuat Standar Akuntansi Keuangan Syariah diharapkan dapat memiliki keseragaman dalam penamaan/kode akun yang akhirnya dapat berdampak pada laporan keuangan yang tidak berbeda. Laporan keuangan antara standar Bank Indonesia serta SAK Syariah akan sama.

## DAFTAR PUSTAKA

- Brigham, Eugene F., dan Houston, F. Joel. 2001. Manajemen Keuangan. Erlangga, Jakarta*
- , 2009. Dasar-dasar Manajemen. Keuangan. Edisi 10. Jakarta: Salemba Empat.
- Gassen , 2010, IFRS for European Small and Medium-Sized Entities? A Theoretical and Empirical Analysis, Universität Bayreuth Faculty of Law and Economics International Accounting (BWL X) 95440 Bayreuth - Germany
- Hariyati. 2012. Analisa Kinerja Keuangan atas Implementasi SAK ETAP pada BPR. Penelitian mandiri tidak dipublikasikan.
- Ikatan Akuntan Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Indonesia. Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik Jakarta : Salemba Empat
- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. Standar Akuntansi Indonesia. Jakarta : Salemba Empat SAK 2009
- Husada, Jan . 2010. Implementasi SAK ETAP : Sumber daya, Peluang dan Tantangan, dalam Kongres XI Ikatan Akuntan Indonesia
- Lombard, Allan ,2009, IFRS for Small and medium-sized entities (SMEs) in the business world. The South African Institute of Chartered Accountant.
- Moleong. 1998. Metodologi Penelitian Kualitatif, CV. Remaja. Rosdakarya, Bandung*
- Mulyadi, 2001, Sistem Akuntansi, Edisi 3, Penerbit PT. Salemba Eban Patria, Jakarta.
- Pacter, Paul. 2009, For Most Private Companies Goes Live , Journal of Financial Executive International : 28 - 30
- Peraturan Bank Indonesia dalam surat edaran No. 11/37/DKBU tgl 1 januari 2010.
- Singh, Ronita and Sue Newberry, 2009, University of Sydney, The International Accounting Standards Board's Agenda Formulation Process: A Standard for Small and Medium-sized Entities, 1-42
- Ramona N., Ema M , Ema M. 2009. Actual Aspects Regarding the IFRS for SME – opinions, debates and future developments. Annales Universitatis Apulensis Series Oeconomica, 11(1) : 32-42

Sudana, I Made. 2009. *Manajemen Keuangan: Teori dan Praktik*. Surabaya: Airlangga University Press.

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 11/37/DKBU tentang Penetapan Penggunaan Standar Akuntansi Keuangan bagi Bank Perkreditan Rakyat.

Shelly, Cashman dan Rosenblatt. 1998. *Systems: Analysis and Design*. Third Edition. USA: Course Technology.

*Strauss, Anselm, & Corbin, Juliet*. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar.

UU No 10 tahun 1998 tentang Penilaian Kesehatan Perbankan

UU No.3 tahun 2004 tentang Penilaian Kesehatan Perbankan

Warren, et. al. 1999. *Prinsip – prinsip akuntansi jilid 1 ( edisi 19)*. (alih bahasa Sirait, A., Guna wan, H.). Jakarta: Penerbit Erlangga.

Surakhmad, Winarno. 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung : Tarsito  
<http://aldoranuary26.blog.fisip.uns.ac.id/2012/02/29/deskriptif-kualitatif/>

Yin, Robert K. 2003. *Studi Kasus Desain dan Metode*. Edisi Revisi. Cetakan Keempat. Terjemahan, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.